

Implementasi Program Smart Kampung Berbasis Web di Kabupaten Sinjai

Ria Mutmainna Ramadani¹, Muhammad Lutfi², Baharuddin³

^{1,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai

*e-mail korespondensi penulis: riamutmainnaramadani@gmail.com

diterima: 25/05/2024. direvisi: 09/08/2024. diterbitkan: 19/08/2024

Abstract

Smart Village is a flagship program of the Sinjai Regency Government which aims to facilitate website-based government services to the community. As time goes by and the serious commitment of the Sinjai Regency Government to accelerate development in the area until 2023, 67 villages and 13 sub-districts are now integrated with Smart Village or already have a website. This research aims to describe how the smart village program is implemented in Sinjai Regency and what factors support the implementation of the web-based smart village policy. This research method uses a qualitative method with a case study approach with collection techniques using studies based on interview results. The results of this research show that the implementation of a web-based Smart Village in Sinjai Regency has gone well. Policy implementation is not only influenced by internal factors but also by external factors. Internal Factors are four important conditions in achieving successful policy implementation according to George C.E. III, namely: Communication, Resources, Dispositions (disposition/behavior), and Bureaucratic Structure (bureaucratic structure). Meanwhile, the external factors are village community participation, support from community leaders, and support from stakeholders.

Keywords: *implementation, program, smart village, web based, Sinjai regency*

Abstrak

Kampung Cerdas adalah program unggulan pemerintah kabupaten Sinjai yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat berbasis website. Seiring dengan berjalannya waktu dan komitmen serius dari pemerintah kabupaten Sinjai dalam melakukan percepatan pembangunan di daerahnya hingga pada tahun 2023 dari 67 desa dan 13 kelurahan yang ada, sekarang sudah terintegritas dengan *Smart Kampung* atau sudah memiliki website. artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana pelaksanaan program smart kampung di Kabupaten Sinjai dan apa saja faktor –faktor yang mendukung telaksanakanya Kebijakan smart kampung berbasis web. . Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan menggunakan studi berdasarkan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengimplementasian Smart kampung berbasis web di Kabupaten sinjai sudah berjalan dengan baik, Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor Internal yaitu empat syarat penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut George C.E. III yaitu: Communication (komunikasi), Resources (sumber daya), Dispositions (disposisi/perilaku) dan Bureaucratic Structure (struktur birokrasi). Sedangkan faktor eksternalnya adalah partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan *stakeholder*.

Kata kunci: implementasi, program, smart kampung, berbasis web, kabupaten Sinjai

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan Revolusi Industri menuju 5.0, semua masyarakat diharapkan sudah paham mengenai teknologi yang sedang berkembang, juga pemanfaatannya. Menurut Hiroaki Nakanishi, Society 5.0 akan menjadi imajinasi masyarakat, di mana transformasi digital menggabungkan dengan kreativitas orang yang beragam untuk membawa “pemecahan masalah” dan “penciptaan nilai” yang dapat membawa kita ke pembangunan berkelanjutan (Mourtzis et al., 2022). Ada banyak arah di mana masyarakat akan maju oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut dikarenakan teknologi diketahui dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik apabila digunakan sesuai dengan porsinya. Ini juga diyakini akan mempengaruhi perubahan ekonomi dan kualitas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam society 5.0, orang akan dibebaskan dari berbagai kendala yang tidak dapat diatasi oleh inkarnasi sebelumnya yakni society 4.0, dan akan memperoleh kebebasan untuk mengejar gaya hidup dan nilai yang beragam. (Bahirah, 2022)

Di Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong perubahan sosial dan politik di wilayah pedesaan. Desa diharapkan terlibat aktif dalam pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Inovasi Daerah yang mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pembangunan perdesaan (Mursalim, 2017). Kemudian, lebih lanjut telah dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia. Berdasarkan kesepakatan tersebut Kemenkominfo bersama 100 pemerintah daerah akan memfasilitasi program smart city dengan perencanaannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Dalam hal ini tentu pengembangan konsep *Smart Village* (desa cerdas) berkaitan dengan kebijakan-kebijakan inovasi yang dimaksud diatas (Widianingsih et al., 2022).

Saat ini dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, Terdapat 34 Provinsi, 112 Kabupaten, dan 13.961 desa yang masih dalam kategori tertinggal dan 2.466 desa dalam kategori sangat tertinggal (IDM kemendes, 2020). Keadaan Ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Sinjai. Dari Data kemendes pada tahun 2023, Kabupaten Sinjai Mengalami Kenaikan Yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga dengan tahun 2023. Berdasarkan data terbaru kemendes pada tahun 2023 ini sebanyak 68 desa di Kabupaten Sinjai, Sebagian besar desa kategori Maju dan berkembang. Jika dibandingkan tahun 2020 yang lalu, status desa tertinggal sebanyak 4 desa sekarang sudah tidak ada desa yang tertinggal, sedangkan untuk desa berkembang dari 48 desa menjadi 10 Desa, Desa dalam kategori maju dari 15 desa untuk tahun 2020 sekarang menjadi 24 desa dan status Desa mandiri yang sebelumnya tidak ada kini menjadi 33 desa.

Kabupaten Sinjai telah meraih beberapa penghargaan sejak diterapkannya kebijakan Smart Kampung. Pada tahun 2023 Kabupaten Sinjai meraih penghargaan Peringkat ketiga terbaik di ajang Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) (Putri,

2023). Tak hanya dalam bidang pariwisata, Kabupaten Sinjai juga mendapatkan penghargaan dari kemendagri atas pengawasan pada bidang pengelolaan asset Desa dan Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil Investasi (LHI) aset Desa Tahun 2021 dan masuk 50 besar nasional (sinjaikab.go.id, 2022). Tentu hal ini tidak lepas dari Implementasi Kebijakan Smart Kampung telah di terapkan di desa-desa di Kabupaten Sinjai sejak tahun 2020.

Saat ini salah satu konsep yang banyak digunakan Pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan transformasi di daerahnya adalah konsep *smart City*. *Smart City* adalah sebuah konsep pembangunan wilayah yang menggabungkan unsur digital, lingkungan dan sosial untuk membentuk peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman (Rahayu, 2022).

Salah satu Kabupaten yang terpilih menjadi focus utama dari pelaksanaan Program Smart City adalah Kabupaten Sinjai. Konsep Smart City diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 dan di *launching* secara resmi pada tahun 2021, kemudian dikembangkan di wilayahnya sebagai salah satu kebijakan startegis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sinjai dan juga sebagai sarana mempermudah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat berbasis website, dan terkhusus di daerah pedesaan dalam menentukan potensi yang ada di desanya.

Pada pengimplementasian konsep smart city perlu untuk memperhatikan pada skala besaran kota. Hal ini dikarenakan masing-masing tingkatan kota memiliki kondisi yang berbeda, permasalahan dan kecepatan perkembangan yang berbeda pula. Begitupula halnya dengan kabupaten, masing-masing juga memiliki karakteristik, permasalahan dan kecepatan perkembangan yang berbeda pula. Pada wilayah kabupaten ada beberapa kawasan yang memiliki karakteristik kekotaan namun demikian sebagian besar wilayah cenderung memiliki karakteristik perdesaan. Dengan demikian perlu adanya konsep pengembangan Smart City yang berbeda salah satunya dengan penggunaan istilah yaitu : *Smart Regency* (istilah untuk tingkat kota) dan *Smart Village* (istilah untuk tingkat Kabupaten atau Perdesaan) (Rini Rachmawati, 2018). Seperti pelaksanaan Program Smart City di Kabupaten Sinjai diubah istilah menjadi Program *Smart Village* (Desa cerdas). Pemilihan kata “Smart Kampung” dari pada *Smart City* dirasa lebih tepat, karena dalam lingkup kabupaten, program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan sasarannya juga masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Sinjai memilih untuk membangun, memberdayakan, dan memintarkan desa karena hampir semua kawasan di kabupaten Sinjai merupakan kawasan pedesaan.

Kabupaten Sinjai telah memiliki satu desain *smart city* dalam bentuk *master plan smart city* dan sudah masuk dalam RPJMD 2018-2023, adapun Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Semua regulasi tersebut telah dijadikan salah satu dasar dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung terlaksananya transformasi digital pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota/kabupaten dalam sebuah sistem *smart connectivity, smart platform, smart services* yang mudah diakses oleh semua orang, juga

untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien, akuntabel, dan adil bagi semua masyarakat (Asdar, 2022)

Smart Kampung adalah program unggulan Pemkab Sinjai yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat berbasis website desa yang dapat menjadi sumber informasi publik bagi masyarakat, bahkan menjadi bagian dari pelayanan administrasi yang berbasis digital atau online. Website tersebut juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat di luar desa untuk mengetahui potensi desa yang ada, bahkan dapat menjadi media promosi produk unggulan yang ada. Instansi penanggung jawab dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah melakukan pelatihan, bimbingan serta pendampingan dalam pembuatan dan pengelolaan website desa.id bagi 67 desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

Dari awal berjalannya kebijakan ini sedikitnya dua desa yang dijadikan sebagai desa percontohan pelaksanaan program Smart Kampung yaitu Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Kassibuleng, kecamatan Sinjai Borong Kedua Desa ini dipilih karena Desa tersebut sangat Representatif mewakili semua Desa yang ada di Sinjai (sri asmaniar, 2020). Sebelum program ini diterapkan, terdapat kendala-kendala dalam pelayanan publik dan infrastruktur di desa-desa di Kabupaten Sinjai. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat desa dalam memahami teknologi yang masih rendah. Oleh karena itu, pentingnya program Smart Kampung diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di desa-desa di Kabupaten Sinjai (Rizal, 2021).

Seiring dengan berjalannya waktu dan komitmen serius dari Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan percepatan pembangunan di daerahnya hingga pada tahun 2023 dari 67 desa dan 13 kelurahan yang ada, sekarang sudah terintegritas dengan Smart Kampung atau sudah memiliki website desa. (Jumardi Ramling, 2023). Dari keberhasilan usaha pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menerapkan Kebijakan Smart Kampung berbasis web, Mendorong penulis untuk lebih mengkaji bagaimana implementasi smart kampung berbasis web yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai tersebut. Keberhasilan tersebut tentunya tak luput dari faktor yang mendorongnya.

Menurut George C.E. III (1980) telah melakukan pengembangan pada model implementasi kebijakan yang ada dengan perspektif top-down. Kemudian George C.E. III (1980) menyebutnya dengan direct and indirect impact implementation. George C. Edward III mengelompokkan keberhasilan suatu Implementasi kebijakan menjadi empat (4) variable, diantaranya: 1. Communication 2. Resource 3. Dispositions 4. Bureaucratic Structure Keempat variabel di atas berinteraksi dan bertindak satu sama lain secara bersamaan dalam membantu maupun menghalangi suatu implementasi kebijakan. Oleh sebab itu pemahaman tersebut tidak boleh terpisah satu sama lainnya. Keempat variabel tersebut merupakan faktor internal dalam Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga akan diteliti dengan melihat beberapa faktor eksternal, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Rahayu, 2022).

Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Sinjai di tandai dengan semakin membaiknya kualitas pelayanan publik, layanan kesehatan, layanan pendidikan serta munculnya berbagai macam mata pencaharian di desa-desa Kabupaten Sinjai. Dari fenomena tersebut maka diperlukanya suatu penelitian untuk melihat secara detail bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan dari tahun 2019 hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menganggap perlu adanya analisis mendalam mengenai Kebijakan Smart Kampung dengan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan di Kabupaten Sinjai? dan faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Sinjai.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sistem dari ilmu pengetahuan, penelitian memiliki kemampuan yang up grade ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan lebih update. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut (W. Lawrence Neuman, 2014) mengungkapkan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan induktif, dimana peneliti mengukur dan membuat konsep baru secara koheren. Memberikan gambaran secara rinci berjalanya suatu program dan tidak hanya terfokus pada desa atau hasilnya saja. Metode penelitian kualitatif dinilai cocok karena bisa menggambarkan secara rinci dan jelas dari pada proses Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian secara detail memberikan penyajian terkait latar hubungan sosial dan juga detail situasinya di lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, Studi kepustakaan. Sumber data penelitian adalah portal berita online lokal yang terpercaya dan kredibel seperti Tribun sinjai, sinjai tv dan artikel jurnal yang relevan serta berdasarkan hasil dari wawancara terhadap informan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Tahapan dalam analisis data yakni pengumpulan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan. (Al-Hamdi et al., 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang diungkapkan oleh George C.E. III dalam (Rahayu, 2022) dimana telah menetapkan terdapat empat syarat atau variabel penting dalam mencapai keberhasilan Implementasi sebuah kebijakan, yaitu *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya) *Dispositions* (disposisi/perilaku) dan *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi). Dari Variabel di atas dapat dilihat bahwa Implementasi Kebijakan *Smart village* di Kabupaten sinjai telah terlaksana dengan baik. Mulai dari komunikasi yang berjalan dengan baik sejak awal kebijakan Smart Kampung ini akan dibentuk, kemudian ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan mumpuni pada setiap OPD pelaksana smart kampung, disposisi/perilaku dari pada pelaksana kebijakan yang sudah sesuai dengan arahan kebijakan serta struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar operasional procedural.

Implementasi kebijakan tidak hanya tergantung dari faktor –faktor diatas (faktor internal) tapi juga terkait erat dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yang di maksud yaitu kondisi yang ada di sekitar pelaksana kebijakan. Dalam pengimplemnetasian kebijakan smart kampung ini ditemukan faktor eksternal dari pelkasana kebijakan ini yaitu dukungan took masyarakat dan juga dukungan dari stakeholder terkait. Dari hasil observasi, kebijakan smart kampung telah mendapat dukungan baik itu dari masyarakat maupun stake holder, sehingga Implementasi smart kampung berbasis wewb sampai saat iini berjalan dengan baik.

3.1. Empat syarat keberhasilan implementasi smart kampung (Faktor Internal)

a) Sumber daya (*Resources*)

Menurut George C.E III sumber daya merupakan hal yang sangat penting. Karena sebaik apapun kebijakan yang akan di buat akan sia-sia jika tidak ada sumber daya manusia dan sumber daya pendukung untuk menjalankan kebijakan tersebut. George C.E III juga mengatakan apabila pelaksana kebijakan mengalami kesulitan dalam sumber-sumber yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya kebijakan tersebut kurang efektif untuk diterapkan. Walaupun dalam proses penerapannya telah dilakukan komunikasi yang baik dan sumber daya (pelaksana) dalam kebijakan smart kampung telah dibentuk. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki staf pelaksana pada kebijakan smart kampung. Sehingga pelaksanaan implementasi smart kampung dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Namun,Tidak hanya sumber daya manusia pada perangkat daerah, sumber daya manusia (pelaksana) juga terdapat pada perangkat desa dan kecamatan di seluruh Kabupaten Sinjai. Seluruh kecamatan dan desa-desa diharuskan mempunyai staf pelaksana atau operator minimal 2 yang menjadi admin dari website desa atau kecamatan yang khusus menangani kebijakan smart kampung berbasis web dan bisa mengerti sistem smart kampung yang telah di instal di desa-desa dan kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Sinjai,

Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya sarana dan prasarana yang mendorong berhasilnya pengimplementasian kebijkaan Smart Kampung .Sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang kebijkaan smart kampung pada kabupaten sinjai sudah jauh lebih baik dari awal dibuatnya kebijkaan ini, dikarenakan pemerintah kabupaten sinjai sudah melakukan perluasan area pembangunan jaringan telekomunikasi dan untuk pemasangan wifi hingga ke desa- ada di Kabupaten Sinjai.

Pada indikator sumber daya kebijakan implementasi smart kampung dapat dikatakan telah mencukupi dan terkelola dengan baik hingga ke desa-desa, dikarenakan admin atau operator yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat desa di bimbing langsung oleh Diskominfo dan sarana prasarana juga sudah di sediakan sehingga pelaksanaan kebijkaan program smart kampung berbasis web dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.

b) Komunikasi (communication)

Indikator ke dua tidak kalah penting dalam mendorong keberhasilan sebuah kebijakan yaitu Komunikasi (Communication), penerapan sebuah kebijakan sangat begitu penting dikarenakan bersentuhan langsung dengan public dan organisasi. Sejak awal diluncurkannya program smart kampung di kabupaten sinjai komunikasi dan sosialisasi telah dilakukan oleh diskominfo kabupaten sinjai tak hentinya dilakukan baik itu komunikasi antar desa dan kelurahan sekabupaten sinjai maupun antara opd sekabupaten sinjai berjalan dengan baik. Dinas komunikasi informatika dan persandian (Diskominfo) sebagai koordinator pelaksana kebijakan smart kampung yang mengatur berbagai persiapan dalam penyusunan kebijakan smart kampung ini, tentunya dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati. Komunikasi yang terjalin oleh Dinas komunikasi informatika dan persandian dengan beberapa Kepala Desa, Lurah dan perangkat Desa Yang ada di Kabupaten Sinjai Seperti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan Persandian Kabupaten Sinjai dalam sosialisasinya mengatakan bahwa “Melalui website Desa ini, semua desa dapat menentukan potensi yang ada di desanya. Selain itu dapat memberi akses kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Diharapkan setelah pertemuan ini, para desa dapat langsung berkoordinasi dengan kami di Diskominfo, karena website Desa ini adalah suatu keharusan bagi pemerintah desa untuk menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” Tamzil Binawan selaku Kadis Kominfo dan Persandian Sinjai (sinjaikab.go.id, 2022) dari sosialisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh diskominfo itu sangat berjalan dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan tidak hanya dengan perangkat desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai Namun juga melibatkan stakeholder yang ada seperti PT Telkom. Tidak sampai disitu saja untuk memaksimalkan penyebaran informasi Kabupaten Sinjai Juga mengandeng media yang merupakan mitra Pemkab Sinjai yakni radio Suara bersatu 95,5 FM dan Sinjai TV (Sinjaikab.go.id, 2023).

Komunikasi dan sosialisasi Yang dijalin dengan baik sedari awal kebijakan ini dibentuk tentunya akan memudahkan dalam implementasi atau penerapan Smart Kampung dan hingga saat ini penerapan smart kampung berjalan dengan baik.

c) Disposisi/ Perilaku (Dispositions)

Menurut Edward III dalam (Rahayu, 2022) mengatakan bahwa perilaku yang baik dan positif dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan itu membuktikan bahwa mereka memberikan dukungan terhadap diri mereka sendiri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula dengan sebaliknya, apabila perilaku yang negative atau berbeda antara pelaksana dan pembuat keputusan, maka penerapan sebuah kebijakan akan menjadi rumit. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan disposisi yang baik pula.

Disposisi adalah variabel ketiga yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. Ketersediaan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sangatlah penting. Komitmen dari pelaksana kebijakan sangat penting selain itu yang kala penting adalah kecakapan dan skill dalam pelaksanaannya. Beberapa hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi ini mengenai dengan pengangkatan birokrat serta pemberlakuan pendidikan dan pelatihan rutin dan pengaruh dari disposisi itu sendiri. Pemilihan dan pengangkatan perosinil yang akan menjalankan kebijakan haruslah sesuai. Pengangkatan yang dilakukan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh atasan, agar bisa mengawalnya dengan baik. Jika pengangkatan dilakukan pada orang-orang yang tidak memiliki dedikasi tinggi dan kompeten di bidangnya, dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian yang nantinya akan menjadi hambatan-hambatan nyata terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengangkatan birokrat pada implementasi smart kampung sudah sesuai, karena yang menangani masalah teknis yang ada di desa maupun kelurahan adalah orang-orang yang sudah memahami IT (Ilmu teknologi). Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah mengenai Pendidikan dan pelatihan Rutin, Hal ini yang sangat penting dalam mendukung suksesnya kebijakan smart kampung, karena dengan diadakannya bimbingan teknis secara rutin dapat menambah pengetahuan sehingga para pelaksana dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik (Sinjakab.go.id, 2023).

Jika pelaksana kebijakan tidak melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana dengan baik, maka bisa jadi akan menimbulkan masalah dan hambatan bagi pengimplementasi kebijakan. Karena itu pengangkatan dan pemilihan terhadap pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang IT serta antusiasme yang tinggi terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya para pelaksana kebijakan smart kampung hingga tingkat desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai sudah berjalan dengan baik. Operator-operator yang bekerja di Desa-desanya yang bekerja untuk mengoperasikan sistem smart kampung juga melakukan tugasnya dengan baik. Karena sejak awal sudah dilakukan penunjukan orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya, Selain itu juga sudah dilakukan pelatihan rutin, sehingga efek disposisi yang ditimbulkan bernilai positif.

d) **Struktur Birokrasi (*Bureaucratics Structure*)**

Struktur birokrasi sangat menunjang terlaksananya kebijakan yang ada. Tanpa struktur birokrasi yang jelas maka pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang ada, walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan, Hal ini akan tetap sulit terlaksana dengan baik. Sebagai pelaksana dalam suatu kebijakan birokrasi harus bisa mendukung kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang baik. Terdapat dua ciri-ciri yang bisa memacu kinerja dari struktur birokrasi dan organisasi yaitu melakukan SOP (standar operasional prosedur) dengan baik

dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada penerapan Implementasi kebijakan smart kampung ini, SOP (Struktur Operasional Prosedur) Khususnya di bidang pelayanan dalam smart kampung, sudah terlaksana dengan baik di desa-desa. Salah satunya adalah SOP yang ada di Desa Tongke-tongke. Desa Tongke- tongke mengeluarkan SOP Layanan informasi desa, dimana terdapat 11 jenis layanan informasi desa tentang pelayanan public antara lain adalah Pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat pindah, pengantar nikah, surat keterangan atau rekomendasi. persyaratan pengurusan akte kelahiran, akte kematian, persyaratan kartu KIA, PBB, Pembuatan SKCK.

Sedangkan Pada pelaksanaan fungsinya dan tugasnya , bahwa pembagian tanggung jawab dan aktivitas-aktivitas pada beberapa desa dan kecamatan telah terlaksana dengan baik. Dari awal bupati telah melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) sebagai Koordinator pelaksana kebijakan smart kampung dan bisa melaksanakan smart kampung dengan baik diharapkan pada desa dan kecamatan dapat berkoordinasi langsung kepada Diskominfo..Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pelaksana fungsi dan tujuan dari Diskominfo telah berjalan dengan baik. Baik itu di tingkat Kabupaten Maupun tingkat Desa. Sehingga Implementasi Smart Kampung dapat berjalan dengan baik.

3.2 Faktor Eksternal Implementasi Kebijakan Smart Kampung

Implementasi Kebijakan Smart Kampung Ini juga perlu adanya dukungan dari pihak luar dalam hal ini adalah faktor Eksternal dalam pengimplementasian kebijakan smart kampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pengimplementasian smart kampung di Kabupaten Sinjai yaitu Partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan stake holder. Dari ketiga faktor eksternal tersebut sudah cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi smart kampung. Melalui partisipasi masyarakat, implementasi smart kampung bisa memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Masyarakat yang dulunya belum mengenal ekonomi secara digital sekarang sudah mengerti dan melakukan berbagai pemasaran produk melalui ekonomi digital.

Saat ini berbagai macam olahan produk baik itu makanan dan kerajinan sudah bisa dipasarkan melalui akses internet. Pemasangan 45 titik wifi di desa-desa yang jauh dari perkotaan Kabupaten sinjai yang bertujuan untuk mempercepat penduduk untuk masuk kedalam akses market secara digital. Kontribusi masyarakat sangat berpengaruh terhadap suksesnya implementasi smart kampung ini. Dalam penelitian yang dilakukan partisipasi masyarakat ada berbagai bentuknya seperti saat ini masyarakat sudah bisa memasarkan produknya melalui platform digital, sudah ada kurirku sinjai, serta masyarakat juga sudah bisa mempromosikan tempat wisata yang ada pada daerahnya melalui website desa atau kecamatan. Masyarakat yang dulunya hanya menjual berbagai macam produk secara langsung, namun sekarang dengan adanya Implementasi kebijakan smart kampung ini, masyarakat desa bisa memasarkan berbagai produknya secara ekonomi digital.

Tokoh masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pengambilan keputusan terkhusus dalam pengimplementasian kebijakan smart kampung ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya tokoh masyarakat sangat menyambut dengan baik mengenai kebijakan smart kampung yang berbasis web ini, di karenakan smart kampung berbasis web ini sangat mempermudah masyarakat dalam bidang ekonomi dan pengetahuan. sehingga pengimplementasian smart kampung berbasis web yang ada pada desa-desa dapat berjalan dengan baik.

Faktor eksternal yang ketiga yaitu stakeholder. Berhasil tidaknya sebuah kebijakan tidak hanya dari dukungan pemerintah dan masyarakat saja, namun juga di dukung oleh adanya stakeholder. Stake holder yng berperan dalam pengiimplementasian smart kampung berbasis web di kabupaten sinjai adalah PT Telkom yang mendukung jalanyanya smart kampung berbasis web hingga saat ini. PT Telkom bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai untuk perluasan area pembangunan jaringan telekomunikasi dan untuk pemasangan wifi hingga ke desa- ada di Kabupaten Sinjai (Sinjaikab.go.id, 2023).

4. Simpulan

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di simpulkan bahwa Implementasi smart Kampung Berbasis web di Kabupaten sinjai berjalan dengan baik dan berhasil. Karena pelaksanaanya telah memenuhi syarat/variabel kesuksesan pelaksanaan Implementasi kebijakan atau faktor internal. Dalam variabel komunikasi antara pelaksana kebijakan maupun komunikasi pelaksana kebijakan dengan stakeholder berjalan dengan baik. Sumber daya (staf) pelaksana mencukupi, informasi juga tersampaikan dengan baik oleh pelaksana, sarana dan prasarana juga mendukung kebijakan smart kampung berbasis web agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian disposisi juga telah dilakukan dengan baik, mulai dari pengangkatan birokrat yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan pemberian pendidikan atau pelatihan yang juga diterapkan sehingga para pelaksana dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik serta bernilai positif. Kemudian variabel yang ke empat adalah Struktur birokrasi. Struktur birokrasi pengimplementasian kebijakan smart kampung berbasis web berjalan dengan baik, mulai dari diterapkannya SOP hingga pelaksanaan fungsi dan tujuan hingga ke desa sudah dijalankan dengan baik.

Selain itu terdapat juga faktor eksternal yang mendorong keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi smart kampung. Terdapat 3 faktor eksternal, yaitu: partisipasi masyarakat desa, support dari tokoh masyarakat dan stakeholder. Dukungan dari masyarakat desa sangat penting dikarenakan tanpa adanya dukungan dari masyarakat desa pengimplementasian kebijakan smart kampung berbasis web tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam kebijakan smart kampung sudah baik dikarenakannya masyarakat desa yang ada di kabupaten sinjai sudah bisa memasarkan melalui online ataupun di website desa. Selanjutnya adalah dukungan dari tokoh masyarakat, dalam penelitian dinyatakan bahwa tokoh masyarakat desa yang ada di kabupaten sinjai sangat mendukung kebijakan smart kampung selagi berdampak positif, dan yang terakhir adalah dukungan dari stakeholder. Dukungan stakeholder sangat penting dalam menentukan keberhasilan

atau kegagalan suatu kebijakan. Melalui penelitian didapatkan bahwa pengimplementasian smart kampung di kabupaten sinjai di dukung oleh stakeholder yaitu PT Telkom. Dimana PT Telkom mendukung kebijakan Smart Kampung dengan memsang Wifi di berbagai titik dengan gratis.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukjizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel ilmiah dengan judul Implementasiprogram Smart Kampung di Kabupaten Sinjai". Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya jurnal artikel ini.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal artikel ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaanjurnal artikel ini.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Q. Ns (Ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Asdar, M. (2022). *Bupati Sinjai MoU Bersama PT. Telkom Indonesia*. Beritabersatu.Com. <https://www.beritabersatu.com/author/admin/>
- Bahirah, H. I. (2022). *SMART VILLAGE SEBAGAI JAWABAN DESA MASA DEPAN*. 11.
- IDM kemendes. (2020). *IDM KEMDES*. IDM KEMeDES. <https://idm.kemendes.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Jumardi Ramling. (2023). *Program Smart Kampung, Kini 80 Desa/Kelurahan di Sinjai Miliki Website*. Saudagar.News. <https://www.saudagar.news/program-smart-kampung-kini-80-desa-kelurahan-di-sinjai-miliki-website/>
- Mourtzis, D., Angelopoulos, J., & Panopoulos, N. (2022). A Literature Review of the Challenges and Opportunities of the Transition from Industry 4.0 to Society 5.0. *Energies*, 15(17). <https://doi.org/10.3390/en15176276>
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126-138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Putri, I. (2023). *Desa Panaikang di Sinjai Raih Penghargaan dari Mendes PD TT*. Detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7071312/desa-panaikang-di-sinjai-raih-penghargaan-dari-mendes-pdtt>
- Rahayu, G. G. A. E. (2022). *Implementasi kebijakan smart kampung di kabupaten banyuwangi*. 8(November), 712-728.

- Rini Rachmawati. (2018). Pengembangan Smart Village untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), 12–19. <https://doi.org/10.37396/jsc.v1i2.9>
- Rizal. (2021). *Dekatkan Pelayanan Publik, Desa di Sinjai Ikuti Bimtek Smart Village di Makassar*. Republiknews.Co.Id. <https://republiknews.co.id/dekatkan-pelayanan-publik-desa-di-sinjai-ikuti-bimtek-smart-village-di-makassar/>
- sinjaikab.go.id. (2022a). *Optimalkan Pelayanan Berbasis Digital, Diskominfo Sinjai Dorong Pemdes Manfaatkan Program "Smart Kampung*. Sinjaikab.Go.Id. [https://www.sinjaikab.go.id/v4/2022/10/04/optimalkan-pelayanan-berbasis-digital-diskominfo-sinjai-dorong-pemdes-manfaatkan-program-smart-kampung/#:~:text="Smart Kampung adalah program unggulan,desa.id%2C"ujarnya.](https://www.sinjaikab.go.id/v4/2022/10/04/optimalkan-pelayanan-berbasis-digital-diskominfo-sinjai-dorong-pemdes-manfaatkan-program-smart-kampung/#:~:text=%22Smart%20Kampung%20adalah%20program%20unggulan,desa.id%2C%22)
- sinjaikab.go.id. (2022b). *Pemkab Sinjai Raih Dua Penghargaan dari Pemerintah Pusat*. Sinjaikab.Go.Id. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2022/06/28/pemkab-sinjai-raih-dua-penghargaan-dari-pemerintah-pusat/>
- Sinjaikab.go.id. (2023a). *Implementasi Platform Satu Data, Diskominfo Sinjai Jalin Kerjasama dengan PT Telkom*. Sinjaikab.Go.Id. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2023/01/13/implementasi-platform-satu-data-diskominfo-sinjai-jalin-kerjasama-dengan-pt-telkom/>
- Sinjaikab.go.id. (2023b). *Implementasi Program Smart Kampung, Diskominfo Sinjai Adakan Bimtek Pengembangan Website Kelurahan*. Sinjaikab.Go.Id.
- Sinjaikab.go.id. (2023c). *Tahun 2023, Diskominfo Sinjai Akan Maksimalkan Smart Kampung dan Penyebarluasan Informasi*. Sinjaikab.Go.Id. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2023/01/02/tahun-2023-diskominfo-sinjai-akan-maksimalkan-smart-kampung-dan-penyebarluasan-informasi/>
- sri asmaniar. (2020). *Program Kampung Cerdas Pemkab Sinjai Mulai Terealisasi*. Sinjaikab.Go.Id. <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/09/30/program-smart-kampung-pemkab-sinjai-mulai-teralisasi/>
- W. Lawrence Neuman. (2014). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Widianingsih, I., Buchari, R. A., Padjadjaran, U., Coblong, K., Bandung, K., Padjadjaran, U., Coblong, K., Bandung, K., Padjadjaran, U., Coblong, K., Bandung, K., Selatan, K. T., Helix, P., & Governance, C. (2022). *KOLABORASI MODEL PENTA HELIX DALAM MEWUJUDKAN Pendahuluan Pemerintah memerlukan kolaborasi untuk mengimplementasikan program dilakukan karena proses , tujuan dan tantangan-tantangan yang dihadapi akan semakin menjadi fokus pembangunan kawasan melalui proy. 7*(November), 1–15.